



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Pinrang pada tanggal 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan penambang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bulawan 14 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan meverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX atas Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Maret 2024 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun, dan yang terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - 3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kotabunan pada tanggal 3 September 2010, Pendidikan SLTP kelas VIII (delapan);
 - 3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kotabunan pada tanggal 11 Januari 2018, Pendidikan TK;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, padahal Termohon telah bekerja dan uang penghasilan Pemohon semuanya di berikan kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4(empat) terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah saudara Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2023 Pemohon datang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon;

7. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadilip perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tercatat Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 22 dan 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX tertanggal 05 November 2020 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 18 Maret 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah kediaman bersama dan terakhir tinggal bersama orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon tidak sabar dan tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Termohon telah memiliki suami lagi sehingga anak-anak lebih baik di asuh oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sebelum bulan puasa;
 - Bahwa menurut keterangan ibu, Termohon telah pindah agama;
 - Bahwa dari pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah teman dekat adik Termohon;
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2023 karena sering terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut, namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa terakhir Saksi menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu setelah pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah dengar dari keluarga Termohon, jika Termohon telah murtad (pindah agama);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tercatat Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 23 dan 30 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, padahal Termohon telah bekerja dan uang penghasilan Pemohon semua diberikan kepada Termohon (*posita permohonan poin 4*). Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak berpisah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri seperti pada umumnya (*posita permohonan poin 5 dan 8*). Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama PEMOHON berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Maret 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon angka 4, angka 5 dan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak pertengahan tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut, sebelum keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini, dan antara keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga masing-masing, namun tidak berhasil. Dengan keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut, Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu sebelum mereka berpisah tempat tinggal dan 4 (empat) bulan yang lalu setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, begitu juga tidak ada komunikasi antara keduanya, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tentang Termohon yang telah keluar dari agama islam (murtad) adalah keterangan yang bukan diketahui langsung oleh kedua Saksi, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut termasuk pada keterangan "*testimonium de auditu*" yaitu keterangan karena mendengar dari orang lain. Maka, keterangan tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P dan Saksi-saksi Pemohon, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 7 Maret 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan; (vide: bukti P.2)
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut sejak 8 (delapan) bulan sebelum keduanya berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu; (vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon)
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi Pemohon dan persangkaan Hakim);
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan permohonan Pemohon (petitum poin 1) dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam persidangan (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi Muhammad Salwa Sofian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tty



Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Salwa Sofian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp 34.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Pbt T	:Rp 10.000,00
4. Pbt T	:Rp 17.000,00
5. Meterai	<u>:Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);